

## BAB V

### SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

#### A. Simpulan

##### 1. Masalah-masalah Strategis yang dihadapi dalam Pendidikan Kepariwisata di Indonesia

###### a. Masalah strategis kompetensi lulusan

Masalah strategis kompetensi lulusan STP Bandung, diantaranya adanya penurunan animo calon mahasiswa untuk mendaftar; sarana, fasilitas teori, praktek, dan pendukung tidak memadai secara kuantitas maupun kualitas; PBM cenderung konvensional & berorientasi ke *hard skill*; tridharma PT belum berjalan optimal; dan budaya mutu belum melembaga dalam proses penyelenggaraan pendidikan.

Sementara itu, masalah strategis kompetensi lulusan STP Bali relative sama dengan STP Bandung, dimana masalah strategis yang paling menonjol adalah mengenai belum optimalnya kualifikasi SDM baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Sedangkan dari sisi sarana, fasilitas teori, praktek, dan pendukung relative lebih memadai dibandingkan dengan STP Bandung.

###### b. Masalah strategis faktor-faktor penentu kualitas lulusan

Masalah strategis faktor-faktor penentu kualitas lulusan di STP Bandung, PBM cenderung tertutup dan konvensional; rendahnya kualitas dan kemampuan para tenaga pendidik dalam melakukan metode pembelajaran terkini dan belum memenuhi standar suatu lembaga pendidikan tinggi kepariwisataan yang berkualitas global; dan ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pendidikan baik untuk teori maupun praktik tidak lagi memadai untuk melaksanakan pendidikan kepariwisataan berkelas dunia.

Sedangkan masalah strategis faktor-faktor penentu kualitas lulusan STP Bali yang paling menonjol adalah belum optimalnya kualifikasi SDM baik tenaga

pendidik maupun tenaga kependidikan; dan terbatasnya anggaran pemeliharaan sarana dan fasilitas pendidikan.

c. Masalah strategis pemenuhan standar kualitas lulusan

Masalah strategis pemenuhan standar-standar kualitas lulusan yang dibutuhkan dan diakui oleh dunia internasional pada STP Bandung, diantaranya mengenai relevansi PBM dengan tuntutan industry; penyiapan peserta didik mengenai kesiapan memasuki persaingan global relative belum optimal.

Sementara itu, masalah strategis pemenuhan standar-standar kualitas lulusan yang dibutuhkan dan diakui oleh dunia internasional pada STP Bali diantaranya adalah belum optimalnya program dan kegiatan untuk mengasah *soft skills* dan *problem solving* dalam PBM; dan belum terealisannya pembiayaan pendidikan yang berdasarkan tahapan-tahapan pendidikan vokasi.

d. Masalah strategis kualitas dosen

Masalah strategis mengenai kualitas dosen yang berdaya saing global pada STP Bandung dan Bali relatif sama, yaitu belum optimalnya kualifikasi pendidik baik akademik mengenai tridharma PT maupun kompetensi profesionalitasnya.

## **2. Strategi Kebijakan untuk Merespon Kebutuhan-kebutuhan Pengembangan SDM ke Depan**

a. Strategi kebijakan pembenahan internal

Strategi kebijakan yang dilakukan STP Bandung dalam pembenahan internal lembaga, diantaranya melalui penyusunan strategi perencanaan dalam upaya meningkatkan kualitas PBM; menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) secara komprehensif dengan menggunakan seluruh aspek yang mendasari pengembangan dan penatalaksanaan lembaga pendidikan tinggi.

Sedangkan strategi kebijakan yang dilakukan STP Bali dalam pembenahan internal lembaga adalah dengan meningkatkan kualitas PBM dengan menerapkan sistem sekolah vokasional secara konsisten.

b. Strategi kebijakan pembenahan eksternal

Strategi kebijakan yang dilakukan STP Bandung dalam pembenahan eksternal adalah dengan melakukan aliansi dengan PT dan industry baik dalam dan luar negeri mengenai pelaksanaan program orientasi ke industry, kegiatan seminar/workshop di dalam dan luar negeri, program bersama (*joint-programme*) dan *dual degree* pada bidang studi Diploma, S1 maupun S2; pelatihan bagi dosen tentang metodologi penelitian dan bimbingan konseling.

Sementara itu, strategi kebijakan dalam pembenahan eksternal yang dilakukan STP Bali diantaranya adalah melalui kerjasama dengan PT di dalam maupun luar negeri tentang Tridharma PT; program *dual degree*; pertukaran pelajar, dosen dan program; mengadakan program *Guest Lecturing* dalam PBM; dan kerjasama untuk rekrutmen di pihak industry (perhotelan dan pihak pengarah tenaga kerja).

c. Strategi kebijakan pembenahan kurikulum

Strategi kebijakan pembenahan kurikulum yang dilakukan STP Bandung, diantaranya adalah melalui pelaksanaan kurikulum mengacu pada *White Paper* yang menjadi dasar pelaksanaan pembenahan kurikulum; melaksanakan dan mengevaluasi kesesuaian dengan kurikulum DIKTI dan *Commont Asean Tourism Curriculum (CATC)* dengan mengikutsertakan para praktisi dari industri pariwisata ditambah para pakar di bidang kependidikan.

Sementara itu, strategi kebijakan pembenahan kurikulum diantaranya adalah dengan meminta pihak luar yang memiliki kompetensi untuk mengampu mata kuliah tertentu; dan melakukan pengembangan profesi bagi semua dosen pengampu mata kuliah sesuai tuntutan kurikulum.

d. Strategi kebijakan pembenahan dosen

Strategi kebijakan pembenahan dosen yang dilakukan STP Bandung adalah melalui pembuatan peta proyeksi jabatan fungsional tenaga pendidik sampai dengan tahun 2019 sebagai panduan dalam pengembangan tenaga pendidik untuk mencapai standar 40% yang memiliki latar belakang pendidikan pariwisata dari PT di luar negeri dan 70% tenaga pendidik yang telah memiliki

sertifikasi *CHE* dari *AHLEI* yang dipecah ke dalam dokumen perencanaan kegiatan serta anggaran tahunan; dan melakukan review dan evaluasi tahunan pencapaian sasaran dari program pemenuhan kualitas tenaga pendidik bertaraf internasional.

Sementara itu, strategi kebijakan pembenahan dosen yang dilakukan STP Bali adalah melalui penyelenggaraan program pengembangan keterampilan para dosen sesuai *trend* yang berkembang di industry baik di dalam maupun di luar negeri.

### **3. Aliansi Strategis Untuk Merespon Persaingan Global**

#### **a. Motivasi dan pra-kondisi aliansi strategis**

Hal yang mendorong (motivasi) STP Bandung untuk melakukan aliansi dengan pihak lain adalah karena adanya dorongan untuk menjadikan STP Bandung sebagai lembaga pendidikan tinggi pariwisata yang terkemuka (*a notable tourism education institution*); memberikan jaminan bagi lulusan untuk dapat bekerja di seluruh dunia pada berbagai tingkatan jenjang jabatan; dan sebagai antisipasi dimulainya *ASEAN Free Trade Area* atau *ASEAN Economic Community* di awal tahun 2015. Sedangkan motivasi STP Bali perlu melakukan aliansi, diantaranya karena merupakan bentuk pengabdian masyarakat; melihat segi kemampuan dan *actualibility*-nya; keuntungan (*benefit*) yang akan di dapatkan; untuk mengembangkan lembaga; dan karena keterbatasan sumber daya termasuk SDM.

Sementara itu, pra-kondisi yang dijadikan pertimbangan STP Bandung dan STP Bali dalam melakukan aliansi dengan pihak lain, diantaranya adalah kesiapan organisasi, tenaga pendidik, kurikulum, dan sarana prasarana pendidikan; secara ekstrenal adalah faktor reputasi mitra. Rujukan kemitraan tersebut orientasinya adalah kepada negara maju yang diakui secara internasional, minimal dengan sertifikasi *UNWTO-TredQual*; dan beroperasi di wilayah RI.

#### **b. Kegiatan dan substansi aliansi strategis**

Strategi aliansi yang dilakukan STP Bandung adalah menggunakan strategi tiga tahapan yaitu: adanya permintaan aliansi, adanya pembahasan awal

yang cukup luas cakupannya, dan membuat *MoU* sebagai ikatan-ikatan dalam mendukung point-point kerjasama baik berupa ikatan formal maupun informal yang dimasukkan ke dalam renstra dan rencana tahunan sebagai indikator kinerja utama (IKU) tahunan lembaga. Untuk menjaga kesinambungan aliansi dilakukan dengan mengembangkan komunikasi melalui monitoring program, dan annual event yang bernama *Partnership Gathering*. Sedangkan menurut STP Bali, pelaksanaan strategi aliansi harus berorientasi pada kepuasan konsumen, dengan mempertimbangkan benefit yang STP akan ambil dari kerjasama.

Aliansi strategis tentang kegiatan dan substansi aliansi yang dilakukan STP Bandung adalah melalui beberapa kegiatan, diantaranya penyelenggaraan pendidikan dengan mitra internasional; penyelenggaraan PKN bagi peserta didik STP; perekrutan lulusan STP untuk bekerja di berbagai usaha pariwisata internasional; pendudukan pengembangan institusi pendidikan kepariwisataan di berbagai daerah di tanah air; penyelenggaraan pendidikan dengan mekanisme pembelajaran jarak jauh. Evaluasi dilaksanakan secara periodik, sifatnya *on papers* atau ditindaklanjuti serius sesuai dengan *Memorandum of Understanding, Letter of Agreement, Letter of Intent*, dan melakukan komunikasi untuk memastikan aliansi dapat diimplementasikan.

Sedangkan strategis tentang kegiatan dan substansi aliansi yang dilakukan STP Bali adalah melalui *guest Lecturing* dalam PBM, kerjasama dalam bidang rekrutmen, pertukaran pelajar, dosen dan program. Bentuk kerjasama dengan industry sudah berjalan dalam bentuk diklat dan konsultan. Sedangkan bentuk kerjasama dengan PT adalah dalam bidang penelitian, program *dual degree* dan seminar-seminar.

### c. Dampak aliansi strategis bagi civitas akademika

Dampak aliansi bagi civitas akademika STP Bandung, diantaranya memberikan manfaat bagi setiap pihak yaitu peserta didik, lulusan, mitra lembaga pendidikan dan industry pariwisata; civitas akademika memiliki *strong confident* untuk menghadapi masa depan yang di era global. Keberhasilan *partnership* tergantung pada adanya rasa keinginan bersama, dan rasa saling membutuhkan.

Sedangkan dampak aliansi bagi civitas akademika STP Bali, diantaranya menciptakan peluang, memiliki partner untuk berdisukusi, menambah wawasan dosen; dan sebagai jembatan untuk memfasilitasi mahasiswa keluar negeri.

## **B. Implikasi**

Implikasi dari temuan penelitian tentang masalah-masalah strategis yang dihadapi dalam Pendidikan Kepariwisata di Indonesia menunjukkan bahwa Sekolah Tinggi Pariwisata menyadari betul bahwa kualitas lulusan ditentukan oleh kualitas semua faktor internal dan eksternal pada sistem pendidikan tinggi. Setiap tahapan tersebut, harus direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara profesional dengan mutu yang baik. Dari sisi *input*, Sekolah Tinggi Pariwisata dibawah KemenPariwisata dihadapkan pada suatu kendala, yaitu kurang tingginya animo masyarakat untuk melanjutkan pendidikan di bidang pariwisata. Sedangkan dari sisi *proses* pendidikan juga ditemui beberapa kendala sekaligus keterbatasan, dimana sebagian besar dari semua unsur yang terlibat di dalamnya (sistem pembelajaran, kemampuan dosen, tenaga kependidikan, sarana dan infrastruktur pendidikan, termasuk kurikulum pendidikan) belum sesuai dengan harapan dan perkembangan serta kompleksitas industri pariwisata saat ini. Temuan ini memberikan implikasi bagi penyelenggara pendidikan kepariwisataan di lingkungan KemenPariwisata, dalam hal ini para Ketua dan unsur pimpinan, dan dosen Sekolah Tinggi Pariwisata dilingkungan Kementerian Pariwisata untuk melaksanakan perubahan mendasar manajemen lembaga secara sistematis, total dan mendasar dengan sasaran utama perubahan orientasi, pandangan, cara berpikir, dan pola perilaku nyata atau *action* sebagai manifestasi adanya perubahan orientasi dan pandangan serta cara berfikir. Temuan ini juga memberikan implikasi bagi STP untuk meningkatkan kesesuaian dan kesepadanan Perguruan Tinggi dengan berbagai kebutuhan dan tuntutan yang berkembang baik dari sistem pendidikan maupun dari dunia bisnis dan industri yang ada di masyarakat, sehingga sasaran operasionalnya semakin luas dan lebar.

Sementara itu strategi kebijakan dalam merespon kebutuhan-kebutuhan pengembangan SDM ke depan, temuan penelitian menunjukkan bahwa proses

belajar mengajar (PBM) merupakan hal yang “strategis” dalam menyiapkan lulusan SDM yang berkualitas dan berdaya saing global. Temuan ini memberikan implikasi tentang pentingnya menjaga kualitas (mutu) PBM baik teori maupun praktek harus berorientasi pada peningkatan kompetensi mahasiswa, baik berkenaan dengan kompetensi skill maupun *soft skills*. Dalam hal ini, Unit Penjamin Mutu, dalam programnya bukan hanya berorientasi pada ketercapaian administrative semata (untuk akreditasi), tapi berorientasi pada perbaikan dan peningkatan kualitas PBM. Selain itu juga, temuan penelitian ini memberikan implikasi tentang perlunya upaya melakukan dan meningkatkan mutu penelitian secara konsisten dan mutu pengabdian kepada masyarakat melalui dikembangkan *quality culture* yang secara bertahap dapat menjadi kebiasaan dalam proses pembelajaran.

Temuan lainnya mengenai aliansi strategis yang dilakukan Sekolah Tinggi Pariwisata dibawah Kementerian Pariwisata menunjukkan bahwa aliansi strategis dengan institusi adalah suatu yang mendesak dan harus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM pariwisata. Temuan ini memberikan implikasi akan pentingnya semua unsur yang terlibat dalam proses pendidikan, terutama unsur pimpinan untuk senantiasa meningkatkan kuantitas dan kualitas kemitraan secara (global) baik berbagai lembaga Perguruan Tinggi maupun dengan badan-badan atau organisasi internasional yang termasuk *government* dan *non-government agencies*. Strategi ini membuka peluang terjadinya pertukaran informasi, pengalaman, penelitian, karya ilmiah, ketenagaan, mahasiswa dan juga penyegaran keilmuan dan teknologi yang berkembang di perguruan tinggi.

### C. Rekomendasi

1. Diperlukan sosialisasi dan promosi tentang Sekolah Tinggi Pariwisata bukan hanya kepada masyarakat Indonesia, tetapi kepada dunia untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas input (calon mahasiswa) sehingga peluang mendapatkan input yang berkualitas lebih besar. Masyarakat yang saat ini melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Pariwisata sebagian besar melalui *word of mouth*. Tidak banyak masyarakat yang mengetahui bahwa Kementerian

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT), yakni Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung dan Bali, Akademi Pariwisata (AKPAR) Medan dan Makassar. Pengetahuan masyarakat tentang Sekolah Tinggi Pariwisata relative terbatas. Khusus untuk STP Bandung, masyarakat lebih mengetahui nama NHI dibandingkan dengan STP Bandung. Oleh karena itu, ketika mempromosikan STP Bandung, nama NHI harus terus disandingkan dengan STP Bandung, karena NHI sudah menjadi *brand* yang melegenda. Upaya mensosialisasikan dan mempromosikan keempat UPT kepada masyarakat Indonesia dan dunia memang memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Artinya, Kementerian Pariwisata harus memberikan perhatian besar dan *political will* pada peningkatan kualitas SDM pariwisata, yang selama ini lebih besar ke bidang pemasaran, destinasi. Upaya ini memang tidak mudah dan perlu diperjuangkan secara serius, karena mengenai politik anggaran kementerian.

2. Pimpinan STP Bandung dan Bali membuat kajian yang komprehensif tentang kemungkinan dilakukannya seleksi penerimaan mahasiswa baru STP Bandung, Bali, AKPAR Medan dan Makassar bergabung dalam SMPTN, dan diusulkan kepada Kepala BPSD.
3. Perlu ada kerjasama yang konkrit antar Sekjen di Kementerian yang dapat mengakomodasi pengembangan SDM pada masing-masing UPT. Selain itu, sebagaimana salah satu temuan penelitian yang mengatakan bahwa STP Bandung dan Bali termasuk juga AKPAR Makassar dan Medan dihadapkan kepada terbatasnya anggaran pengembangan SDM. Mengingat STP dan AKPAR secara keuangan Negara tidak diperbolehkan membuat anggaran pemberian beasiswa atau bantuan pendidikan, karena hal itu bukan merupakan tugas dan fungsi lembaga STP dan AKPAR. Oleh karena itu untuk meningkatkan kapasitas SDM pada UPT Kementerian Pariwisata khususnya dosen/tenaga pengajar, maka para pimpinan UPT harus memberi usulan dan mendorong agar Menteri Pariwisata melalui Kepala BPSD dan dilanjutkan ke Sekretaris Jenderal Pariwisata untuk melakukan aliansi

strategis dengan Kementerian Pendidikan sehingga muncul *MoU* antara Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pendidikan dalam pemberian Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS) bagi dosen/tenaga pengajar bagi semua UPT dibawah Kementerian Pariwisata. Pengembangan SDM harus menjadi kebijakan dan program prioritas Kementerian Pariwisata. Saat ini, dalam skala makro, walaupun Kualitas SDM pariwisata merupakan hal strategis dan menjadi salah satu indikator kinerja Kementerian Pariwisata, namun tidak jadi prioritas utama. Karena target-target Kementerian Pariwisata saat ini lebih kepada target-target yang lebih riil, target-target ekonomi yang lebih cepat dapat dicapai dan terukur, sementara kalau berbicara pengembangan SDM merupakan investasi jangka panjang. Dengan kondisi seperti ini, STP sebagai UPT tidak memungkinkan melakukan inovasi karena merupakan organisasi birokrat yang secara structural berada di bawah BPSD dan badan baru ke Kementerian.

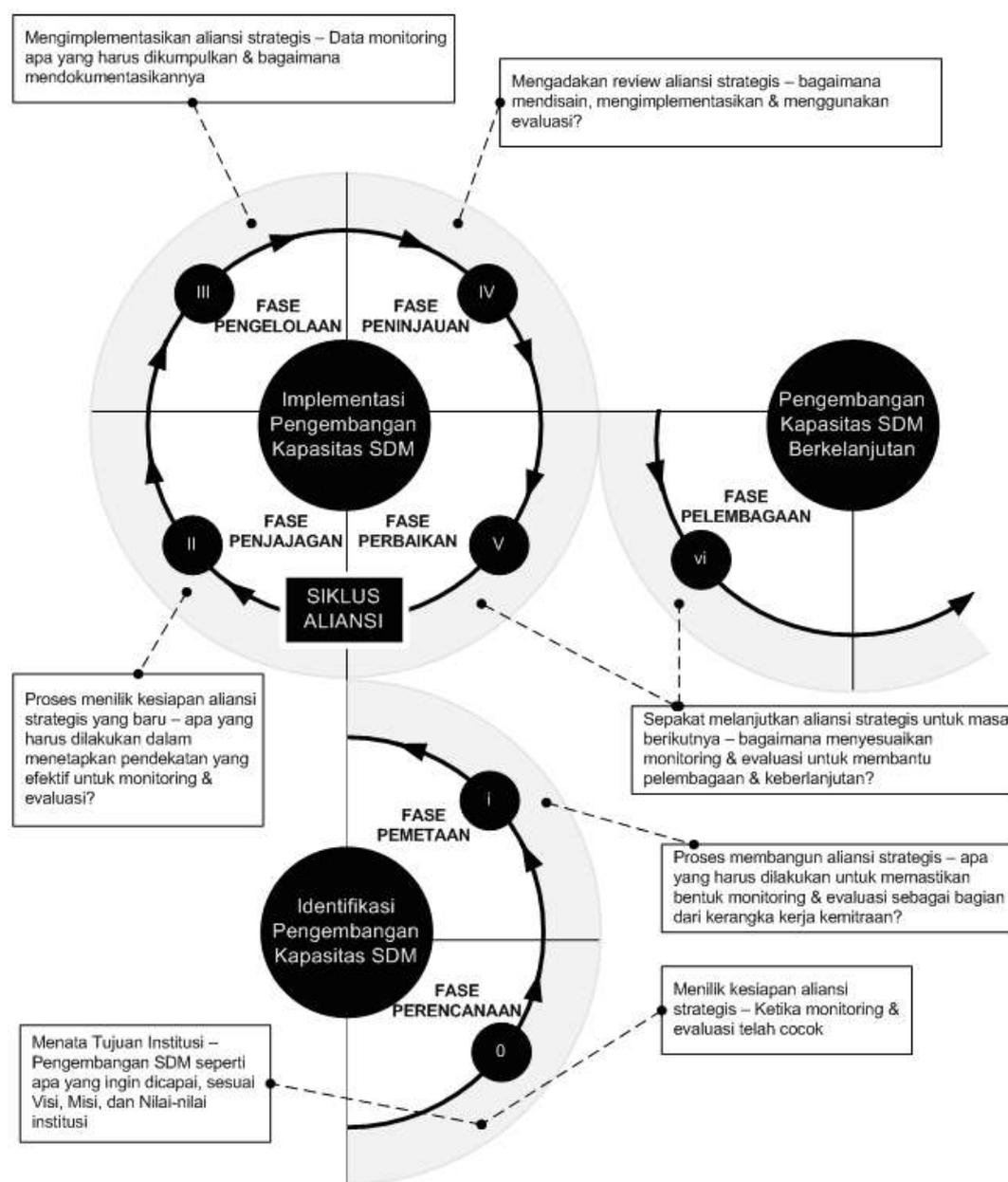
4. Harus dilakukan upaya optimalisasi pelaksanaan aliansi strategis dengan pihak industry untuk membenahi sarana dan fasilitas pendidikan terutama fasilitas praktek. Reputasi yang STP miliki sampai saat ini dapat dijadikan modal kerjasama dengan industry. Industri memiliki sumber dana, dan STP memiliki sumber daya manusia yang mereka butuhkan. STP harus meyakinkan dan membuktikan bahwa SDM yang dihasilkan STP memiliki kualifikasi yang indistri butuhkan. STP memiliki modal dasar sebagai lembaga pariwisata tertua di Indonesia dan dikenal di kalangan industri.
5. Pimpinan STP perlu membuat usulan kepada Sekjen c.q. Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU) agar PHRI, ASITA dan asosiasi usaha pariwisata lainnya untuk bekerjasama dengan STP tentang kewajiban setiap usaha perhotelan memberikan perkuliahan di STP secara periodik tentang perkembangan yang ada di industri.
6. STP Bandung dan Bali harus melakukan kerjasama/aliansi strategis dengan Perguruan Tinggi dalam negeri dalam mengembangkan dosen terutama berkenaan dengan mengoptimalkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan

Tinggi. Oleh karena itu, STP harus segera merealisasikan rencana perubahan status dari Sekolah Tinggi menjadi Institut, karena akan memberikan implikasi yang besar bukan hanya bagi dosen, tetapi juga bagi seluruh civitas akademika. Dengan cara membuat kajian serius, komprehensif yang melibatkan para pakar dan instansi yang berwenang, sehingga tahapan-tahapan prosesnya terukur dan pasti.

7. Unit SPM harus segera membuat SOP *pengelolaan* pendidikan dan menjalankannya secara konsisten. Untuk itu diperlukan pengawasan pimpinan bagaimana mengimplementasikannya. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga kualitas pendidikan diperlukan standar *pengelolaan* pendidikan yang melembaga. Saat ini budaya mutu belum dimiliki oleh sebagian besar civitas akademika STP.
8. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh STP Bandung dan Bali ketika akan menjalankan aliansi strategis dengan pihak industry atau organisasi lainnya, diantaranya: (1) bagaimana konstelasi aliannya? (disain dan manajemen portofolio aliansi yang akan dikembangkan oleh suatu organisasi); (2) bagaimana disain aliannya? (bentuk aliansi yang akan dikembangkan, meliputi seperti apa tujuan aliansi, bagaimana pemilihan partner, dan bagaimana struktur aliannya); (3) bagaimana pengelolaan aliannya? (pengelolaan hubungan (*relationship*) dan pengelolaan aliansi); dan (4) bagaimana kapabilitas aliansi yang dimiliki oleh organisasi tersebut? (kesiapan internal organisasi dalam menjalankan aliansi strategi dan *knowledge management* yang dimiliki oleh organisasi). Keempat pertanyaan tersebut perlu dilakukan STP Bandung dan Bali agar aliansi strategis yang dilakukan memberikan keuntungan berkelanjutan bagi pihak-pihak yang terbibat. Dengan mempertimbangkan keempat pertanyaan tersebut, maka STP Bandung dan Bali dapat melakukan aliansi strategis melalui 3 (tiga) langkah aliansi strategis berkelanjutan, yang secara visual, aliansi strategis berkelanjutan tersaji dalam gambar 5.1. pada halaman berikut.

a. Identifikasi pengembangan kapasitas sumber daya manusia, melalui 2 (dua) fase kegiatan, yaitu :

- 1) Fase Perencanaan : Menata tujuan institusional mengenai pengembangan SDM seperti apa yang ingin dicapai sesuai visi, misi, dan nilai-nilai institusi. Menilik kesiapan melakukan aliansi strategis, yaitu ketika monitoring dan evaluasi telah cocok.
- 2) Fase Pemetaan : Proses membangun aliansi strategis apa yang harus dilakukan untuk memastikan bentuk monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari kerangka kerja aliansi strategis.



Sumber : diadaptasi dari IIEP-UNESCO (2012:24)

Gambar 5.1. Model Aliansi Strategis Berkelanjutan

b. Implementasi pengembangan kapasitas SDM pendidikan, melalui 4 (empat) fase kegiatan, yaitu :

- 1) Fase Penjajagan : Proses menilik kesiapan aliansi strategis yang baru - apa yang harus dilakukan dalam

Herlan Suherlan, 2014

*Implementasi manajemen strategik pendidikan dalam meningkatkan keunggulan bersaing berkelanjutan melalui aliansi strategis*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

menetapkan pendekatan yang efektif untuk monitoring dan evaluasi.

- 2) Fase Pengelolaan : Mengimplementasikan aliansi strategis - data monitoring apa yang harus dikumpulkan dan bagaimana mendokumentasikannya
- 3) Fase Peninjauan : Mengadakan Review aliansi strategis - bagaimana mendisain, mengimplementasikan dan menggunakan evaluasi
- 4) Fase Perbaikan : Sepakat melanjutkan aliansi strategis untuk masa berikutnya - bagaimana menyesuaikan monitoring dan evaluasi untuk membantu pelebagaan dan keberlanjutan aliansi strategis.

c. Pengembangan kapasitas SDM pendidikan berkelanjutan, melalui pelebagaan aliansi strategis. Kegiatan ini dilakukan secara bersamaan dengan fase perbaikan yaitu melakukan kesepakatan melanjutkan aliansi strategis untuk masa berikutnya, bagaimana menyesuaikan monitoring dan evaluasi untuk membantu pelebagaan serta keberlanjutan aliansi strategis.

9. Disertasi ini masih belum sempurna, sehingga membutuhkan penelitian lanjutan mengenai anggota sampling dan focus kajiannya. Penelitian hanya mengambil sampling pada Sekolah Tinggi Pariwisata pada UPT Kementerian Pariwisata. Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan melibatkan 4 (empat) UPT, yakni Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung dan Bali, juga Akademi Pariwisata (AKPAR) Medan dan Makassar. Bahkan lebih baik lagi jika penelitian dengan focus telaahan yang sama dengan sampel yang lebih besar bukan hanya mengenai keempat UPT Kementerian Pariwisata saja, tetapi melibatkan PTS yang menyelenggarakan pendidikan tinggi kepariwisataan khususnya yang sudah menjadi anggota Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Kepariwisata (HILDIKTIPARI). Mengenai

focus kajian, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan dengan lebih mengkaji lebih spesifik, misalnya khusus mengkaji pada mutu dosennya, mahasiswanya dan unsur-unsur lainnya yang terlibat dalam sub system pendidikan. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan diantaranya mengenai informan yang tidak melibatkan mahasiswa sebagai salah satu stakeholder pendidikan. Oleh karena itu peneliti selanjutnya perlu menjadikan mahasiswa sebagai salah satu informan.